

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan karya Ilmiah ini yaitu Untuk mengetahui urgensi pertanggungjawaban partai politik terhadap eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui pengaturan ideal pertanggungjawaban partai politik terhadap eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Adapun dalam hal pertanggungjawaban pidana terkait uang pengganti dapat dibebankan kepada partai politik dikarenakan partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi berdasarkan definisi partai politik dan korporasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, namun dalam kenyataan di lapangan belum ada satupun partai politik yang turut dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota atau pengurusnya meskipun partai politik tersebut menerima dana hasil dari tindak pidana korupsi. Dengan begitu perlu ada peraturan yang menagkomodir pembebanan uang pengganti oleh partai politik dalam tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

Kata Kunci: Partai Politik, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific work is to find out the urgency of accountability for the policy of execution of substitute money in corruption cases and to know how ideally to regulate accountability for the execution of substitute money in corruption cases in the future. The research method used is normative juridical. In the event that criminal liability related to money can be charged to a political party, it can be categorized as a corporation based on the definitions of political parties and corporations as stated in Law Number 31 of 1999 as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 2 of 2008 as amended in Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties, but in reality on the ground there are no political parties that have been subject to criminal responsibility for crimes of corruption committed by their members or administrators even though the politics received funds from the proceeds of corruption. Thus, it is necessary to have regulations that accommodate the imposition of substitute money for corruption and money laundering.

Keywords: political parties, replacement money, criminal acts of corruption